



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIAMIS KELAS IA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis., sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon II. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Edi Kurniadi, S.H., M.H.dan Iqbal Maulana Candra Pratama, S.H., yang berkantor di Lingk. Cibitung Girang RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 618/II/K/2023/I/K/2023/PA.Cms. tanggal 06 Februari 2023, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Cms tanggal 06 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Catin Perempuan**

Tempat Lahir : Ciamis

Tanggal Lahir : 14 April 2004

Umur : 18 tahun 9 bulan

Jenis Identitas : KTP

Nomor Identitas : xxxxxxxx

Alamat : Kabupaten Ciamis

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pendidikan : MTs

dengan calon suaminya :

Nama : **Catin Laki-laki**

Tempat Lahir : Ciamis

Tanggal Lahir : 01 Oktober 2000

Umur : 22 tahun

Jenis Identitas : KTP

Nomor Identitas : xxxxxxxx

Alamat : Ciamis

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pendidikan : SMK

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis.

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Cms



yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon sudah hamil 24 minggu;

Bahwa permohonan pernikahan antara **Catin Perempuan** dengan **Catin Laki-laki** telah didaftarkan di KUA Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis ternyata di tolak, sesuai dengan surat penolakan dari KUA Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis dengan Nomor : xxxxxxxx tertanggal 26 Januari 2023;

Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai penghasilan yang layak kurang lebih per bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan, menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Catin Perempuan** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Catin Laki-laki**;
- 3.Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasanya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Cms



Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 (dua belas) tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terkait permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Catin Perempuan telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saat ini ia telah berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa ia sedang berhubungan (berpacaran) dengan seorang laki-laki bernama Catin Laki-laki dan atas pilihannya sendiri ingin menikah;
- Bahwa ia sudah cukup lama berpacaran dengan calon suaminya tersebut dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Catin Laki-laki telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia sedang menjalin hubungan (berpacaran) dengan anak Pemohon yang bernama Catin Perempuan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa ia dan anak Pemohon sudah sering bertemu dan pergi berdua dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia sudah siap menikah dengan anak Pemohon dan bertanggungjawab tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan setiap bulan;
- Bahwa ia siap berusaha dan menyiapkan diri menjadi seorang suami yang baik, melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab terhadap keluarga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon pengantin pria yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah orang tua dari calon suami anak Pemohon dan mengenal Pemohon;
- Bahwa ia dan Pemohon berencana dan sepakat akan menikahkan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anaknya berpacaran dengan anak Pemohon sudah cukup lama dan sudah sedemikian dekat;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa paksaan dari orang tua atau dari pihak lain;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, darah, sesuan atau semenda dan tidak ada hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa ia dan Pemohon siap untuk membantu dan membimbing kedua calon mempelai terkait dengan pernikahan dan rumah tangga kedepannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Cms



A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. xxxxxxxx Tanggal 07 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. xxxxxxxx Tanggal 06 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx Tanggal 22 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor xxxxxxxx tanggal 27 September 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, bermeterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon NIK. xxxxxxxx Tanggal 06 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor xxxxxxxx, Tanggal 14 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Cms



7. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon Nomor xxxxxx, Tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala MTS PUI Ciparigi Kecamatan Sukadana, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon Nomor xxxxxxxx, Tanggal 30 Januari, atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sukadana, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon Nomor xxxxxxxx, tanggal 26 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon Nomor xxxxxxxx, Tanggal 15 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami Nomor xxxxxxxx, Tanggal 31 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami Nomor xxxxxx, Tanggal 04 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Cms



13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami Nomor xxxxxxxx, Tanggal 30 Januari 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Ciparigi, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

B. Saksi-saksi :

Saksi Pertama

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, saksi adalah Paman dari calon suami;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Catin Perempuan dengan seorang laki-laki bernama Catin Laki-laki namun hal tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga rencana pernikahan keduanya harus disegerakan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut berstatus perawan, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan calon suaminya berstatus jelek;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sepengetahuan saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga, sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan setiap bulan;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi adalah Paman dari calon isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Catin Perempuan adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama #0600#;
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama menolak rencana pernikahan tersebut karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan ada kekhawatiran bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa, sudah siap menjadi suami, sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hal yang dapat menghalangi untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapa pun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Pemohon kepada Advokat:

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Cms



Edi Kurniadi, S.H., M.H. dan Iqbal Maulana Candra Pratama, S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Catin Perempuan, umur 18 tahun 9 bulan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.13 yang berupa asli atau fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah, terbukti bahwa anak Pemohon bernama Catin Perempuan tersebut penduduk dalam wilayah Kabupaten Ciamis, masih berusia 18 tahun 9 bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pendidikan terakhir MTs;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat, terbukti bahwa anak pemohon dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama setempat, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Catin Perempuan dengan Catin Laki-laki, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10, P.11 dan P.12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 22 tahun, dan tidak ada hubungan keluarga darah, sesusuan atau semenda dengan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan setiap bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR. dan Pasal 171 HIR., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami dan bukti-bukti yang diajukan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Cms



dalam persidangan, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Catin Perempuan telah menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang laki-laki bernama Catin Laki-laki;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin cukup lama dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
- Bahwa pihak keluarga dan masyarakat sekitar merasa khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan dan dilarang agama bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mengetahui, menyetujui rencana pernikahan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan rencana pernikahannya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon bernama Catin Perempuan saat ini berumur 18 tahun 9 bulan dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan calon suaminya bernama Catin Laki-laki umur 22 tahun siap bertanggungjawab sebagai suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan bersedia membimbing terhadap rumah tangganya;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Catin Laki-laki terhalang oleh umur anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 (sembilan belas) tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Cms



Pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinahan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya mudharat yang lebih

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Cms



besar dari mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab’ Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka (1) dan (2) permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Cms



50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Catin Perempuan** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Catin Laki-laki**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. U. Nurdin, S.H sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ciamis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag

Drs. U. Nurdin, S.H

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	50.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	90.000,00
Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	225.000,00
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2023/PA.Cms